

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor Kontrak : 01/PL/SPK/PNP/FISIP-UNAND/2019  
Tanggal : 3 September 2019**



**ANALISIS MODEL *HUMAN GOVERNANCE* DALAM IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BUKITTINGGI**

**Oleh :**

**1. Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si (Ketua)  
2. Nisa Ul Fitriani (Anggota)**

**NIDN: 0014058601  
BP: 1410842021**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Model *Human Governance* dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi
2. Bidang penerapan : Sosial
3. Ketua Pelaksana
  - a. Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP : 19860514 201012 2 006
  - d. Pangkat/golongan : Penata / III C
  - e. Jabatan : Lektor
  - f. Disiplin Ilmu : Sosial
  - g. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  - h. Universitas : Universitas Andalas
  - i. Telepone : 081325052826
4. Mata kuliah yang diampu : Teori Administrasi Negara,
5. Anggota Tim Penelitian : 1 orang  
Nama Anggota Nisa Ul Fitirani
6. Lokasi Penelitian : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi (Pokja PKP)
7. Biaya : Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
8. Sumber dana : Dana Rutin FISIP

Padang, 12 November 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Peneliti

Dr. Ria Ariany, M.Si  
NIP. 197302132008122001

Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si  
NIP. 198605142010122006

Menyetujui,  
Dekan FISIP Univ.Andalas

Dr. Alfian Miko, M.Si  
NIP. 196206211988111001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	2
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Urgensi Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Pemukiman Kumuh .....	9
2.2 Program Kota Tanpa Kumuh .....	9
2.3 Model <i>Human Governance</i> .....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>13</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	13
3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Informan .....	13
3.3 Instrumen Penelitian .....	14
3.4 Analisis Data .....	14
<b>BAB VI PEMBAHASAN</b> .....	<b>16</b>
4.1 Adanya Akuntabilitas Sosial .....	18
4.2 Pendidikan bagi Warga Negara .....	20
4.3 Kesamaan dan Kebebasan.....	21
4.4 Partisipasi.....	22
4.5 <i>Sustainability</i> .....	23
4.6 Bantuan Subsidi .....	24
4.7 Kompetisi di Tingkat Global .....	25
4.8 Kinerja Administrasi Publik Pemerintah yang Adaptif .....	25
4.9 Realibilitas .....	27
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
5.1 Kesimpulan .....	28
5.2 Penutup .....	28

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA TIM PENELITI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Bukittinggi .....	3
Tabel 1.2 Kondisi Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Aua Tajunggang Tengah Sawah Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Kotaku .....	6
Tabel 4.1 Profil Permasalahan Permukiman di Kelurahan Aua Tajunggang Tengah Sawah.....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Bangunan Rumah dan MCK Umum di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah.....	4
Gambar 1.2 Saluran Limbah di Kelurahan Pakan Kurai .....	5
Gambar 4.1 Kondisi Jalan Paving sebelum (Kiri) dan Kondisi 25% (Kanan) Program Kotaku di Kelurahan Pakan Kurai .....	21
Gambar 4.2 Kondisi Drainase sebelum (Kiri) dan setelah 50% (Kanan) Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah.....	22
Gambar 4.3 Kondisi MCK sebelum (Kiri) dan setelah 75% (Kanan) Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Pakan Kurai.....	24

## Abstrak

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu program Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengatasi permasalahan Pemukiman Kumuh di Indonesia. Program ini memfokuskan kepada penguatan sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas. Dengan demikian, pelaksanaan Program Kotaku akan mendorong penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai salah satu Daerah Tingkat II yang melaksanakan Program Kotaku, Kota Bukittinggi telah menetapkan 2 kawasan kumuh yang menjadi sasaran pelaksanaan program ini. Kawasan tersebut adalah Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai yang sama-sama terletak di Kecamatan Guguk Panjang.

Program Kotaku di Kota Bukittinggi mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Hingga tahun 2019 sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari, perbaikan permukaan jalan lingkungan penduduk sepanjang 1.312 M, perbaikan drainase sepanjang 1.078 M, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan sampah untuk 230 KK. Namundemikian, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program Kotaku yaitu belum mampu meningkatkan kualitas pemeliharaan drainase serta belum tersedianya sarana proteksi kebakaran.

Pelaksanaan program Kotaku melibatkan banyak aktor dari pemerintah daerah, masyarakat, bahkan swasta. Hal ini mendorong kolaborasi antara semua pihak dengan karakteristik yang berbeda. Maka dibutuhkan pendekatan *Human Governance* atau memanusiakan sistem guna menghindari konflik kepentingan antar aktor pelaksana. Model *Human Governance* adalah model kultural yang menata hubungan antara negara dan individu atau kelompok masyarakat dengan cara memberdayakan dan memberikan pada warga dalam bertindak.

Kata Kunci: Program Kota Tanpa Kumuh, Kolaborasi, *Human Governance*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Program Kota Tanpa Kumuh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Sebagai pedoman di lapangan maka Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Berdasarkan kebijakan ini maka setiap daerah kabupaten/ kota diharuskan menyusun rancangan rencana pelaksanaan program Kotaku.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi mulai dijalankan pada tahun 2016, dengan menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Menurut BPS Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi merupakan kota terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang dengan luas wilayah 25.24 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 126.804 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kawasan dengan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan ini tentunya akan memicu permasalahan lingkungan, terutama masalah pemukiman. Mulai dari perumahan yang layak hingga kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.

Pada saat yang bersamaan, Kota Bukittinggi mendapat sederet penghargaan, yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup serta Kota Hidup Sehat, yang tertuang pada website resmi Kota Bukittinggi, yaitu<sup>1</sup>:

1. Penghargaan Pastika Parama, yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka percepatan pencegahan penyakit tidak menular.
2. Adipura, yaitu penghargaan dibidang lingkungan hidup. Dalam rangka kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
3. Nirwasita, yaitu penghargaan dibidang program kerja. Dalam rangka metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Website resmi Kota Bukittinggi. <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/sebelas-prestasi-nasional-kado-istimewa-di-hjk-bukittinggi-ke-233> . diakses pada tanggal 25 Februari 2019

4. Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan), yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka kota sehat.

Walaupun Kota Bukittinggi mendapat sederetan penghargaan di bidang Lingkungan Hidup, namun masih terdapat permasalahan terkait permukiman kumuh. Hal ini dapat dilihat pada SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014 terkait lokasi permukiman kumuh, seperti pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**

**Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi**

No	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Koordinat		Tingkat Kekumuhan
					Lintang	Bujur	
1.	Aur Tajunggang Tengah Sawah	Aur Tajunggang Tengah Sawah	Guguak Panjang	8,48	0 <sup>0</sup> 18' 28,779" LS	100 <sup>0</sup> 22' 23,353" BT	Kumuh Berat
2.	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Guguak Panjang	22,12	0 <sup>0</sup> 18' 14,135" LS	100 <sup>0</sup> 22' 35,204" BT	Kumuh Berat

*Sumber: SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014, 2018*

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat dua kelurahan dengan kategori kumuh berat. Adapun luasan keseluruhan permukiman kumuh ini adalah sebanyak 30,6 Ha<sup>2</sup>. Tetapi pada tahun 2016 luasan ini bertambah seiring dengan dilakukannya kegiatan penyusunan dokumen, Rencana Aksi Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), berdasarkan Memorandum Program RP2KPKP Kota Bukittinggi menjadi sebesar 65,30 Ha, atau adanya penambahan sekitar 97%. Kondisi ini berdampak pada kelurahan lainnya. Untuk penambahan luasan lokasi kumuh Kota Bukittinggi saat ini masih dalam proses pembuatan SK Walikota Bukittinggi. Surat Keputusan Walikota mengenai Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh merupakan salah satu kebijakan yang mendasari pelaksanaan program.

Kota Bukittinggi memiliki tiga kecamatan dan terdiri dari 24 kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki tingkat permasalahan permukiman kumuh yang berbeda, namun di Kota Bukittinggi memiliki dua kelurahan yang mendapat predikat dengan tingkat permukiman kumuh yang lebih dibanding dengan kelurahan lain, sebagaimana hal ini telah

<sup>2</sup> SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014



dilakukan penilaian oleh pihak pemerintah daerah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Jalan lingkungan.
2. Drainase lingkungan.
3. Penyediaan air bersih/ minum.
4. Pengelolaan air bersih.
5. Pengelolaan air limbah.
6. Pengamanan kebakaran.
7. Ruang terbuka publik.

Kondisi pemukiman di Kelurahan Aur Tajunkang Tengah Sawah dapat dilihat dari gambar berikut;

**Gambar 1.1**  
**Kondisi Bangunan Rumah dan MCK Umum di Kelurahan ATTS**



*Sumber: Dokumentasi Tim Koordinator Kota Bukittinggi, 2018*

Selain itu, kondisi saluran limbah bungan juga masih belum tertata dengan baik, hal ini dapat terlihat pada gambar berikut;

---

<sup>3</sup> SE Dirjen Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Hal. 3

## Gambar 1.2

### Saluran Limbah di Kelurahan Pakan Kurai



*Sumber: Dokumentasi Tim Koordinator Kota Bukittinggi, 2018*

Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan kondisi pemukiman pada 2 kelurahan yang dinilai tingkat kekumuhan pemukimannya sangat berat. Dengan adanya program Kotaku, maka lingkungan pemukiman kumuh di kelurahan ATTS dan Pakan Kurai tentunya menjadi sasaran dari pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah dimulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan program Kotaku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan sehingga dapat memenuhi target tidak ada lagi permukiman kumuh pada tahun 2019 sesuai dengan gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Setelah tiga tahun implementasi program Kotaku, maka sudah mulai bisa dilihat dampak dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.2

### Kondisi Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Kotaku

**PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH**

Provinsi : SUMATERA BARAT Kab/Kota : KOTA BUKITTINGGI Kecamatan : GUGUAK PANJANG Kawasan : AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	Luas SK : 10,03 Ha Luas Verifikasi : 10,03 Ha Jumlah Bangunan : 399 Unit Jumlah Penduduk : 1.880 jiwa Jumlah Bangunan : 498 KK	0-24 % Tidak ada permasalahan 25-50 % Permasalahan ringan 51-75 % Permasalahan sedang 76-100 % Permasalahan Berat
---	--	--

  

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	202,00	Unit	50,63%	1		0	Unit	202,00	Unit	50,63%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0		0	Ha	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Pery. Teknis Bangunan	76,00	Unit	19,05%	0		0	Unit	76,00	Unit	19,05%	0
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pavingan Jalan Lingkungan	45,00	Meter	2,00%	0		0	Meter	45,00	Meter	2,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1.150,00	Meter	51,22%	3	Peningkatan Jalan Lingkungan	1.312	Meter	-	Meter	0,00%	0
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	93,00	KK	18,27%	0	Berkasus Jaringan Air Minum	29	KK	62,00	KK	12,45%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195,00	KK	39,18%	1	Berkasus Jaringan Air Minum	87	KK	108,00	KK	21,69%	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0		0	Ha	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketersediaan Drainase	70,00	Meter	2,89%	0		0	Meter	70,00	Meter	2,89%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0,00%	0		0	Meter	-	Meter	0,00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	1.700,00	Meter	70,75%	3	Bahub Drainase	1.076	Meter	622,00	Meter	25,70%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1.960,00	Meter	78,40%	5	Peningkatan Drainase Lingkungan	1.226	Meter	734,00	Meter	30,33%	1
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	24,00	KK	4,87%	0		0	KK	24,00	KK	4,87%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	230,00	KK	46,18%	1		0	KK	210,00	KK	42,00%	1
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	148,00	KK	29,72%	1		0	KK	148,00	KK	29,72%	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	60,00	KK	12,05%	0		0	KK	60,00	KK	12,05%	0
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	148,00	KK	29,72%	1		0	KK	148,00	KK	29,72%	1
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	365,00	Unit	91,48%	5		0	Unit	365,00	Unit	91,48%	5
	b. Ketidaksiediaan Sarana Proteksi Kebakaran	399,00	Unit	100,00%	5		0	Unit	399,00	Unit	100,00%	5
				<b>TOTAL NILAI</b>	<b>26</b>					<b>TOTAL NILAI</b>	<b>16</b>	

Sumber: Dokumen Laporan Koodinator Kota Bukittinggi, 2019

Dari tabel 1.2 dapat diketahui perubahan nilai tingkat kekumuhan lingkungan, khususnya di Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah. Dari nilai 26 menjadi 16. Perbaikan ini merupakan langkah awal yang membuktikan bahwa program Kota Tanpa Kumuh bisa merubah wajah lingkungan menjadi lebih bersih, sehat dan layak huni.

Keberhasilan awal merubah kondisi pemukiman kumuh ini disebabkan oleh adanya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Dimulai dari pemerintah daerah, swasta dan yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan aktif masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, bahkan hingga ke tahap pemeliharaan. Selain adanya partisipasi aktif masyarakat, juga adanya perilaku pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh semua aktor yang terlibat. Dengan memasukkan masyarakat sebagai salah satu bagian utama dalam program ini, sudah merupakan upaya pendidikan bagi warga negara untuk mau berperan aktif dalam proses pembangunan tidak hanya menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terdapat di lapangan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Model *Human Governance* dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam pelaksanaan program Kotaku, masyarakat tidak hanya sebagai kelompok sasaran yang menikmati hasil program. Akan tetapi masyarakat lebih sebagai aktor pelaksana dan juga menjadi salah satu bagian yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan program Kotaku. Oleh karena itu sangat dimungkinkan terciptanya Model *Human Governance* dalam proses pelaksanaan program. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Model *Human Governance* dalam Proses Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi.
2. Menganalisis pelaksanaan Model *Human Governance* dalam proses implementasi kebijakan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi.

## **1.4 Urgensi Penelitian**

Program Kotaku merupakan program nasional yang dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi<sup>4</sup>. Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Keberhasilan program Kotaku tidak lepas dari dukungan Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, kelurahan hingga masyarakat setempat. Melihat kompleks dan banyaknya aktor yang terlibat, maka perlu dipastikan bahwa semua aktor bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberhasilan implementasi program Kotaku.

Tujuan program Kotaku adalah:<sup>5</sup>

1. Menurun atau berkurangnya luas pemukiman kumuh.

---

<sup>4</sup> Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

<sup>5</sup> Ibid, hal 4

2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Poka PKP) di tingkat Kabupaten/ kota dalam penanganan pemukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan pemukiman kumuh tingkat kabupaten/ kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam RPJMD.
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan hidup kumuh.

Mengingat sangat konkritnya tujuan yang hendak dicapai, tentunya harus dipastikan bahwa pelaksanaan program Kotaku harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Mengingat banyaknya aktor yang terlibat maka perlu dilihat pendekatan Model *Human Governance* dalam pelaksanaan program Kotaku tersebut. Karna itulah penelitian ini urgen dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses Implementasi program Kotaku dengan menggunakan pendekatan Model *Human Governance* khususnya di Kota Bukittinggi. Temuan-temuan di lapangan tentunya akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui hambatan, tantangan, dan juga hal pendorong dalam proses implementasi program Kotaku. Sehingga bisa melakukan perbaikan kedepannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemukiman Kumuh**

Menurut Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia No.2 tahun 2016, Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun kriteriannya adalah:

1. Bangunan gedung, dilihat dari; ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan teknis bangunan.
2. Jalan lingkungan, dilihat dari; Cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan.
3. Penyediaan air minum, dilihat dari; ketersediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4. Drainase lingkungan, dilihat dari; ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase kota, tidak terpeliharanya drainase, kualitas konstruksi drainase.
5. Pengelolaan air limbah, dilihat dari; sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Kondisi pengelolaan persampahan, dilihat dari; prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Pengamanan kebakaran, dilihat dari; ketersediaan sarana dan prasarana pengamanan kebakaran.
8. Ruang terbuka publik/ hijau.

#### **2.2 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)**

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan<sup>6</sup>.

Program Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Prinsip dasar pelaksanaan program Kotaku adalah:<sup>7</sup>

1. Pemerintah Daerah sebagai Nakhoda, pemda memimpin pelaksanaan program Kotaku secara kolaboratif dengan semua aktor pemangku kepentingan.
2. Perencanaan yang komprehensif dan berorientasi *outcome*, penataan pemukiman dilaksanakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan program.
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, perencanaan penanganan pemukiman kumuh merupakan produk daerah yang mengacu kepada visi kaupaten/ kota dalam RPJMD. Sehingga penganggarnya terntegrasi dengan perencanaan di kabupaten/ kota.
4. Partisipatif, program ini memadukan model prencanaan *top-down* dengan *bottom-up*, sehingga perencanaan dan pelaksanaan ditingkat masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dielakkan bahkan harus dimaksimalkan.
5. Kreatif dan inovatif, hal ini ditujukan untuk upaya mengembangkan ide-ide dan cara baru dalam melihat dan menyelsaikan masalah.
6. Pengelolaan lingkungan dan sosial, sebagai salah satu upaya menjamin keberlanjutan pelaksanaan program.
7. Tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini menjadi pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
8. Investasi penanganan pemukiamn kumuh, tidak hanya menata perkembangan kota akan tetapi juga harus mampu mningkatkan daya dukung lingkungan.
9. Revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat dari orientasi penanganan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumh.

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 2

<sup>7</sup> Ibid, Hal. 6

### 2.3 Model *Human Governance*

*Human governance* merupakan suatu model kultural yang menata hubungan antara negara dengan individu, sebagai warga negara yang mempunyai kebebasan memilih, kemerdekaan berbeda suara, harga diri dan hak diperlakukan oleh warga negara<sup>8</sup>. Model *human governace* dimaksudkan juga sebagai cara memanusiakan administrasi pemerintah.

Model *Human givernance* berfokus kepada pemberdayaan dan pembaharuan budaya administrasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan budaya individu atau masyarakat sebagai warga negara.

Menurut Mario Baggini dalam buku Miftah Thoha, menyebutkan bahwa prinsip pelaksanaan Model *Human Governance* adalah:<sup>9</sup>

1. Prinsip Akuntabilitas Sosial

Prinsip ini dipahami sebagai wujud dari realisasi dan implementasi dari perilaku pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh administrasi negara. Prinsip ini harus dijadikan alat untuk berdialog dengan stakeholders, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian hasil.

2. Prinsip Pendidikan bagi Warga Negara

Prinsip ini dipahami sebagai proses “belajar” melalui pendidikan dan pelatihan pada setiap saluran informasi yang tersedia. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan rasa memiliki dan memperkuat kesadaran untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak dalam rasa memiliki tersebut.

3. Prinsip Kesamaan dan Kebebasan

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin adanya kesamaan dan kebebasan bagi semua aktor pelaksana dan kelompok sasaran tanpa kecuali. Baik dalam tahap pelaksanaan kebijakan terlebih dalam pencapaian hasil kebijakan.

4. Prinsip Partisipasi

Pada prinsip ini dimungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan dialog antar pemerintah dengan masyarakat. Salah satu tujuan partisipasi adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan dan program.

---

<sup>8</sup> Miftah Thoha, Hal. 156

<sup>9</sup> Ibid, Hal. 157



5. Prinsip *Sustainibilitas*

Prinsip ini memberikan intervensi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan program sebagai tujuan untuk pengembangan kesejahteraan dan pemenuhan hak warga negara.

6. Prinsip Bantuan Subsidi

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada kelompok sasaran dari sebuah kebijakan dan program. Prinsip ini bisa dicapai dengan memodernisasikan administrasi publik, melalui inovasi dan kreatifitas sumber daya yang tersedia.

7. Prinsip Kompetensi di Tingkat Global

Prinsip ini dimaksudkan sebagai upaya menyederhanakan dan melakukan transparansi kebijakan. Hal ini harus selaras dengan upaya memaksimalkan dampak kebijakan dan program yang hendak dicapai.

8. Prinsip Kinerja Administrasi Pemerintahan yang Adaptif

Prinsip ini dimaksudkan sebagai upaya memahami pencapaian tujuan dalam waktu yang singkat dengan tetap memperhatikan standar layanan. Hal ini ditujukan untuk mendorong kreatifitas aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan proses administrasi publik.

9. *Realibilitas*

Prinsip ini dipahami sebagai hasil dari keseimbangan hubungan antara negara, institusi dan warga negara. Pelaksanaan prinsip ini mendorong terciptanya transparansi dari aparatur dan warga negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini dibedakan atas data primer dan sekunder. Menurut Lofland (dalam Moleong 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan, yang dilakukan melalui wawancara. Pengambilan data primer akan dilakukan secara *purposive sampling*.

##### **2. Data sekunder**

Menurut Sugiyono (2004:156) sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu dokumen, laporan, atau arsip mengenai kelembagaan Pokja PKP, Koordinatot Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Relawan.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data dan informan**

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini menurut Nasution (dalam Mursalin 2002), meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi yaitu Kota Bukittinggi khususnya Kelurahan Aua tajungkakng Tengah Swah (ATTS) dan Kelurahan Pakan Kurai, yang kemudian menemui Pokja PKP, Koordinator Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Relawan.
2. Berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
3. Mengumpulkan data. Peneliti memasuki tahapan mengumpulkan data melalui:
  - a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Model yang digunakan adalah

wawancara terstruktur berdasarkan pada pedoman wawancara, serta wawancara yang tidak terstruktur untuk mengembangkan hal-hal yang memerlukan informasi mendalam.

- b. Dokumentasi. Pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagai informasi dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan terkait dengan lokasi penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dan terlibat langsung, antara Lain:

- a. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Bukittinggi.
- b. Satuan Kerja Kota Bukittinggi.
- c. Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang.
- d. Pemerintah Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah.
- e. Pemerintah Kelurahan Pakan Kurai.
- f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
- g. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- h. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP).
- i. Relawan.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi dalam penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri. Menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Catatan lapangan dan alat tulis. Untuk menghimpun data-data dalam penelitian dan menghindari kesalahan terhadap pengamatan yang dilakukan.
3. Pedoman wawancara. Serangkaian daftar pertanyaan tentang proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi.

### **3.4 Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi (1992), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

1. Reduksi data.

Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final menggambarkan tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan.

2. Penyajian Data.

Merupakan kumpulan informasi tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah disajikan tentang tema penelitian.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi.

Suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, membangun wawasan umum yang disebut analisis. Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, mencatat suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang *grounded*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh kondisi permukiman kumuh yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/ kota. Sebagai upaya mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu Kota Tanpa Permukiman Kumuh pada tahun 2019, maka Dirjen Cipta Karya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku mendorong pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni.

Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sasaran dari program Kotaku adalah semua daerah yang memenuhi indikator kawasan kumuh yaitu: keteraturan bangunan, jalan lingkung, drainase, ketersediaan air minum, sanitasi, persampahan, dan kebakaran.

Kota Bukittinggi terkenal sebagai salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Kenyataan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyuguhkan kota yang bersih dan tertata rapi. Pada kenyataannya, terdapat dua kelurahan yang memenuhi indikator kategori kumuh berat, yaitu Kelurahan Aua Tajungkah Tengah Sawah (ATTS) dan Kelurahan Pakan Kurai yang berada pada Kecamatan Guguk Panjang. Melihat kondisi tersebut, maka kedua kelurahan tersebut menjadi sasaran atau target dari pelaksanaan program Kotaku.

Pada tahap implementasi, program Kotaku di Bukittinggi menggunakan pendekatan Kolaboratif. Pendekatan *Collaborative Governance* merupakan bentuk pelaksanaan program dengan cara melibatkan semua stakeholders secara aktif. Stakeholders yang dimaksud pada program Kotaku adalah pihak pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta dan masyarakat setempat. Pelaksanaan program Kotaku sudah dinilai berhasil karena terjadinya penurunan luas permukiman kumuh khususnya di daerah Kelurahan Aua Tajungkah Tengah

Sawah dan Kelurahan Pakain Kurai yang sama-sama berada pada Kecamatan Guguak Panjang. Keberhasilan pelaksanaan Program Kotaku seharusnya juga mampu memansuikan administrasi atau lebih dikenal dengan Model *Human Governance*.

*Human Governance* merupakan budaya baru bagi Administrasi Publik, dapat juga disebut sebagai upaya memansuikan administrasi publik. *Human Governance* hadir disebabkan karena munculnya persoalan-persoalan baru dari perspektif teknis dan struktural untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diharapkan dalam menata pemerintahan yang baik. Terdapat empat dasar prinsip pemerintahan yang baik yang mendorong lahirnya *Human Governance*, yaitu:<sup>10</sup>

1. Menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih baik.
2. Lebih banyak inovasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menciptakan regulasi yang lebih baik.
4. Manajemen pelatihan sumber daya manusia yang lebih terbuka dan jujur.

Fokus perhatian *Human Governance* adalah mengubah posisi manusia dari objek menjadi subjek, selain itu juga harus bisa memperbaiki hubungan antara negara dengan warganya secara menyeluruh.

*Human Governance* merupakan suatu modal kultural yang menata hubungan antara negara dengan individu. Sebagai warga negara memiliki kebebasan memilih, kemerdekaan berbeda pendapat, harga diri, dan diperlakukan sama oleh negara. *Human Governance* juga bisa dikatakan sebagai upaya menjadikan pemerintah atau Administrasi Publik berwarna kemanusiaan atau memansuikan kembali Administrasi Publik. *Human Governance* cenderung memberdayakan dan memperbaharui budaya administrasi yang dijalankan oleh pemerintah dan budaya individu atau kelompok masyarakat. Dengan konsep tersebut, maka Administrasi Publik harus mampu memenuhi kebutuhan warganya dan bisa diandalkan oleh warganya. Menurut Mario Baggini, *Human Governance* bertujuan agar proses administrasi publik menghargai setiap individu manusia sebagai subjek yang memainkan berbagai peran dalam mewujudkan keberhasilan suatu tata pemerintahan.<sup>11</sup>

Mengingat Program Kotaku bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, maka harus diupayakan pelaksanaan prinsip *Human Governance* dalam setiap tahap pelaksanaannya. Untuk melihat bagaimana penerapan *Human Governance* pada Program Kotaku di Kota

---

<sup>10</sup> Miftah Toha, Hal. 155

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 157

Bukittinggi maka dapat kita lihat dari penerapan prinsip-prinsip *Human Governance* menurut Mario Baggini berikut ini:

#### **4.1 Adanya Akuntabilitas Sosial**

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan Administrasi Publik untuk menggambarkan arus pelaksanaan pertanggungjawaban. Akuntabilitas sosial tidak bertentangan dengan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh warga negara, baik masyarakat sipil maupun swasta dalam mewujudkan kesejahterannya.

Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi, yaitu;

- a. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Bukittinggi.
- b. Satuan Kerja Kota Bukittinggi.
- c. Pemerintah Kecamatan Guguak Panjang.
- d. Pemerintah Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah.
- e. Pemerintah Kelurahan Pakan Kurai.
- f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
- g. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- h. Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP).
- i. Relawan.

Setiap aktor memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pokja PKP, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai “nakhoda” atau memimpin dan mengarahkan terjadinya kerjasama antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya kegiatan Musrembang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi pada Tahun 2017. Musrembang perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan target capaian Pembangunan Kota Bukittinggi.

Nilai akuntabilitas sosial terlihat dari peserta musrembang yang berasal dari semua komponen stakeholders. Musrembang perubahan ini diikuti oleh, perwakilan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, perwakilan badan usaha, anggota DPRD, dan organisasi masyarakat. Hasil Musrembang Perubahan pada tahun 2017 menghasilkan kesepakatan bahwa sebagai Kota Wisata, maka Kota Bukittinggi harus tampil bersih dan bebas kumuh. Dengan demikian, Kota Bukittinggi mendukung RPKMN yang berbasis 100-0-100, yaitu 100% pemenuhan akses air bersih, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.

Disusunnya RPJMD berbasis 100-0-100 adalah hasil kerjasama yang baik antara Tim Koordinator Kota IV dengan melakukan langkah loby, negoisasi dan advokasi untuk menyuarakan pentingnya penanganan permukiman kumuh dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan lingkungan permukiman yang layak huni secara berkelanjutan.

Setelah pelaksanaan Musrembang Perubahan, maka Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kota Bukittinggi mulai melakukan pertemuan dan mengupayakan peningkatan kapasitas. Pokja PKP Kota Bukittinggi melakukan pertemuan awal guna menyamakan visi dan misi bersama dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Kotaku. Berdasarkan SK Walikota Tahun 2016, terdapat 2 kelurahan yang menjadi sasaran pelaksanaan program Kotaku, yaitu Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakain Kurai.

Dari awal Program Kotaku dilaksanakan yaitu tahun 2017 hingga 2019 dilihat kauntabilitas sosial sudah bisa diwujudkan terbukti dari beberapa hal yaitu;

- a. Diawali dengan menyiapkan rekomendasi kebijakan, peraturan, strategi, dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan kota dan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP), seperti SK Lokasi Kumuh yaitu SK Walikota No. 188.45-300-2014 tentang Penetapan Lokasi Pemukiman Kumuh di Kota Bukittinggi.
- b. Memastikan kolaborasi berjalan efektif serta memediasi penanganan masalah antar sektor/ lembaga/ tingkatan pemerintahan dengan komunitas termasuk fasilitator dan tim koordinator kota, melalui rapat rutin dengan agenda monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan program Kotaku.
- c. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di tingkat kota dengan tingkat komunitas dan mengkoordinasikan keterpaduan program pencapaian target kota layak huni.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kebijakan dan mengkomunikasikannya ke tim Pokja Provinsi dan nasional jika dibutuhkan.



- e. Menyusun rencana pemukiman kumuh tingkat kota termasuk memorandum program penanganan pemukiman kumuh yang komprehensif. Hal ini dilakukan secara partisipatif dan hasil kesepakatan disahkan melalui SK Kepala Daerah.

Dari uraian di atas maka dapat diyakinkan bahwa akuntabilitas sosial sudah bisa diwujudkan dengan baik dalam pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi.

#### **4.2 Pendidikan bagi Warga Negara**

Prinsip ini, dipahami sebagai bagian dari proses "*learning*" dan dapat diberikan melalui sistem pendidikan, pelatihan, pemberian informasi, kreatifitas rasa tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk memperkuat rasa memiliki dari semua warga negara terhadap semua aktifitas dan program pemerintahan. Aparat pemerintah beserta masyarakat harus aktif dan kreatif dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tersebut.

Penanganan pemukiman kumuh memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Karena pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN disebutkan, salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) ha.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pemukiman kumuh ini adalah dengan melakukan Program Kotaku. Pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan bersinergi antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Maksudnya adalah, terjadinya proses penguatan peran Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pimpinan yang mengarahkan terwujudnya kolaborasi antara pemko dengan semua pihak pemangku kepentingan. Melalui kolaborasi inilah maka secara tidak langsung sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Masyarakat tidak hanya dituntut untuk memelihara hasil pembangunan Program Kotaku. Melainkan bisa ikut terlibat dari tahap awal perencanaan awal program. Keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dari dibentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertujuan ikut merencanakan, melaksanakan dan menagwasi proses Program Kotaku. Dengan adanya pelibatan masyarakat dari awal perencanaan maka akan memberikan informasi dan gambaran jelas mengenai proses pengambilan keputusan dalam tahap persiapan program Kotaku. Harapannya masyarakat mempunyai rasa memiliki dalam program ini, sehingga bisa ikut menjaga hasil akhir dari program Kotaku ini.

### 4.3 Kesamaan dan Kebebasan

Pelaksanaan *Human Governance* harus mampu mewujudkan dan menjamin adanya kesamaan dan kebebasan bagi semua stakeholders, baik sebagai aktor pelaksana ataupun sebagai sasaran. Kesamaan dan kebebasan bisa dimaksudkan antarlain dalam memperoleh;

- a. Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan profesionalitas.
- b. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat.
- c. Berperan serta aktif secara demokratis.
- d. Menggunakan kebebasan waktu

Semua manusia diperlakukan sama di depan hukum dan dalam proses administrasi publik.

Pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi ditetapkan pada dua kelurahan sebagai sasaran program, yaitu Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Prinsip keadilan dan kesamaan dapat dilihat dari proses penetapan dua kelurahan tersebut dengan dokumen legal SK Walikota no. 188.45-300-3014. Luas total daerah sasaran Program Kotaku adalah 30,6 Ha, dengan rincian luas permukiman kumuh di Kelurahan Aua Tajung Tangah Sawah 8,48 Ha dan di Kelurahan Pakan Kurai 22,12 Ha.

Melihat hasil di lapangan dapat diketahui bahwa pencapaian prinsip kesamaan dan keadilan dapat diwujudkan pada Program Kotaku di Kota Bukittinggi ini. Hal ini dibuktikan dari beberapa capaian pada kedua kelurahan tersebut sama-sama baik, tidak ada yang lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya, seperti terlihat pada gambar berikut;

**Gambar 4.1**  
**Kondisi Jalan Paving sebelum (Kiri) dan Kondisi 25 % (Kanan) Program Kotaku**  
**di Kelurahan Pakan Kurai**



Sumber: Dokumen Kelompok Swadaya Masyarakat pakan Kurai, 2019

Untuk kondisi perkembangan pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah dapat dilihat pada gambar berikut;

**Gambar 4.2**  
**Kondisi Drainase sebelum (Kiri) dan setelah 50% (Kanan)**  
**Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah**



*Sumber: Dokumentasi Kelompok Swadaya Mandiri Kelurahan ATTS, 2019*

Dari gambar tersebut dirasa telah mewakili bahwa Program Kotaku dilaksanakan dengan baik dan objektif berlaku sama bagi semua warga masyarakat yang membutuhkan.

#### **4.4 Partisipasi**

Prinsip partisipasi merupakan sebuah kesempatan bagi Administrasi Publik dan warga untuk bertukar informasi dan berdialog, di luar keterlibatan swasta.

Salah satu manfaat program Kotaku adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan pemukiman perkotaan di kawasan kumuh yang meliputi akses terhadap; drainase, air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengamanan kebakaran dan tersedianya ruang terbuka hijau.

Partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya mereka yang tinggal di daerah sasaran pelaksanaan Program Kotaku sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari aktifnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terlibat dalam setiap kegiatan yang diadakan. Bentuk partisipasi aktif salah satu KSM adalah dengan tersedianya dana mandiri KSM yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program Kotaku.

Keebrhasilan ini dicapai oleh KSM “Sehati” yang memiliki laba Usaha Simpan Pinjam yang cukup besar. Laba UPK tersebut disepakati untuk menambah anggaran pelaksanaan perbaikan drainase di kelurahan Belakang Balok. Meskipun Kelurahan Belakang

Balok tidak termasuk dalam daerah yang ditetapkan menjadi sasaran permukiman kumuh, namun KSM cukup mandiri dalam menata kelurahannya. Selain perbaikan drainase, laba UPK KSM tersebut juga disepakati untuk memblei pot permanen yang ditanam bunga-bunga warna warni dan ditata disepanjang jalan kelurahan. Kondisi ini tentunya menambah asri lingkungan Kelurahan Belakang Balok. Selain untuk tujuan kebutuhan lingkungan, laba KSM juga digunakan untuk kegiatan sosial berupa sunatan massal untuk anak laki-laki keluarga miskin di lingkungan Kelurahan Belakang Balok.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Bukittinggi sangat baik dan aktif dalam melaksanakan dan mendukung keberhasilan Program Kotaku.

#### **4.5 *Sustainability* (Keberlanjutan)**

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan intervensi atau pengaruh untuk pengembangan kesejahteraan warga masyarakat. Intervensi yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi lingkungan, daerah dan budaya lokal. Program dan proyek yang berhubungan dengan pencapaian kondisi kesejahteraan tersebut harus diupayakan dan dikembangkan secara keberlanjutan melalui proses Administrasi Publik. Pelayanan yang diberikan oleh Administrasi Publik hendaknya selalu dikembangkan dan menjamin adanya keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberlangsungan suatu program kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya harus menjadi syarat program yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Administrasi Publik.

Program Kotaku di Kota Bukittinggi sudah dijalankan dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini terbukti dari awal mula program pada tahun 2017 hingga 2019 telah mampu menciptakan perubahan lingkungan secara signifikan, seperti terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.3**  
**Kondisi MCK sebelum (Kiri) dan setelah 75% (Kanan) Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Pakan Kurai**



*Sumber: Dokumen KSM Kelurahan Pakan Kurai, 2019*

Dari gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa program Kotaku yang memfokuskan pada perbaikan drainase, MCK, dan penegcoran jalan merupakan sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Karena hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut tidak hanya bisa dinikmati untuk saat sekarang tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang. Tentu syarat utama untuk penerapan prinsip *sustainable* ini adalah kemampuan masyarakat untuk menjaga semua fasilitas yang sudah ada.

#### **4.6 Bantuan Subsidi**

Prinsip ini merupakan sebuah bantuan modal untuk menyelesaikan tata hubungan dalam memberikan layanan kepada pengguna manfaat dalam sebuah proses layanan Administrasi Publik. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan hubungan yang lebih dekat masyarakat, sektor swasta, dan kelompok-kelompok lainnya. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mewujudkan prinsip ini adalah dengan mempromosikan penggunaan strategi manajemen pelayanan publik yang lebih efisien, *outsourcing*, kemitraan sektor publik dan swasta serta sistem privatisasi yang efisien dengan tetap menghargai kearifan lokal yang ada.

Sumber dana pelaksanaan Program Kotaku berasal dari APBN, APBD dan dana u. Dana keswadayaan masyarakat. Dana keswadayaan masyarakat yang dimaksud adalah dana yang berasal dari kesepakatan masyarakat untuk membatu proses pengerjaan proyek program Kotaku. Dana tersebut ada yang bersumber dari laba KSM, iuran KSM, donatur dari para perantau dan dari relawan. Tidak tergantungnya sumber dana dari pemerintah hal ini

membuktikan tingkat kemandirian dan antusias masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku ini. Selain dari masyarakat ada juga dari pihak swasta melalui sistem CSR.

Kondisi ini menggambarkan bahwa prinsip bantuan subsidi sudah bisa terpenuhi dengan baik.

#### 4.7 Kompetisi di Tingkat Global

Prinsip ini bertujuan untuk memberikann jaminan kondisi yang optimal terhadap pencapaian produktifitas dan kompetisi dalam mewujudkan pertumbuhan sosial dan ekonomi yang kondusif.

Program Kotaku bertujuan memberikan akses terhadap air bersih, sanitasi dan pemukiman yang layak. Maka dengan dilaksanakannya program Kotaku diharapkan bisa merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, dari yang kurang bersih menjadi lebih mengutamakan kebersihan. Lingkungan yang bersih tentunya mendorong terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Lingkungan yang sehat serta jasmani yang juga sehat akan mendorong iklim kehidupan bermasyarakat yang kondusif. Sehingga bisa berinteraksi dan berkompetisi dengan lingkungan luar. Secara tanpa disadari kondisi tersebut mendorong terciptanya ekonomi yang lebih mapan. Maka harapan menjadikan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang sehat dan sejahtera dapat diwujudkan.

#### 4.8 Kinerja Administrasi Publik Pemerintah yang Adaptif

Prinsip ini menjamin pencapaian tujuan program dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan pemenuhan standar layanan minimal.

Pada awal pelaksanaan Program Kotaku maka Pokja PKP berhasil mengidentifikasi kondisi awal dua kelurahnn yang menjadi sasaran program, seperti pada tabel berikut;

**Tabel 4.1**  
**Profil Permasalahan Permukiman di Kelurahan Aua Tajungkang tengah Sawah**

NO	Kriteria/ Indikator	Parameter
1	Keteraturan Bangunan	43% bangunan hunian tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan	Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (28 unit/ Ha)
3	Kelayakan Fisik Bangunan	- 24% bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 m2 per orang.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 23% bangunan hunian memiliki atap, lantai dinding tidak sesuai persyaratan teknis.</li> </ul>
4	Aksesibilitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 47% Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai.</li> <li>- 66% kondisi jaringan pada kawasan permukiman berkualitas buruk</li> </ul>
5	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4% kawasan permukiman terjadi genangan air/ banjir.</li> <li>- 70% kondisi jaringan drainase pada permukiman berkualitas buruk.</li> </ul>
6	Pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16% bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki jaringan air bersih perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak.</li> <li>- 45% masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60 L/orang/hari.</li> </ul>
7	Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 12% bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses jamban/ MCK komunal.</li> <li>- 37% bangunan hunian permukiman tidak memiliki kloset yang terhubung dengan tangki septik.</li> <li>- 0% saluran pembuangan air limbah rumah tangga tercampur dengan drainase lingkungan.</li> </ul>
8	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8% sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu.</li> </ul>
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 79% kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/ sarana proteksi kebakaran.</li> </ul>

*Sumber: Data Baseline Aua Tajung Kang Tengah Sawah*

Dari data awal pada tabel 4.1 tersebut, maka Pokja PKP bersama Tim Koordinator .Kota, Fasilitator dan Kelompok Swadaya Masyarakat menyusun dan menetapkan proyek yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian proyek yang dikerjakan sesuai dengan permasalahan masyarakat sehingga harapannya bisa membantu masyarakat keluar dari masalah yang dihadapinya.

Dalam pelaksanaan Program Kotaku semua aktor pelaksana sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Terlihat dari terlaksananya proyek pada wilayah yang sudah disepakati dan yang lebih utama mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi

#### **4.9 *Realibilitas***

Prinsip ini menggambarkan hubungan yang seimbang antara institusi pemerintah dan warga masyarakat. Keseimbangan ini sebagai wujud dari adanya dialog dan terciptanya iklim yang saling menghargai serta saling percaya diantara keduanya.

Program Kotaku sudah diawali dengan melibatkan masyarakat secara aktif mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek kegiatan. Cara ini tentunya mendorong rasa memiliki pada masyarakat. Adanya rasa memiliki akan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga setiap fasilitas yang ada dan dibuat sebagai bentuk proyek kegiatan Program Kotaku. Pelibatan masyarakat juga menumbuhkan rasa dihargai dalam diri masyarakat. Sehingga dengan cara tersebut, maka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta akan terjalin kondusif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Renstra Dirjen Cipta Karya tahun 2015-2019, sebagai upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam mencapai 100% kawasan Kumuh. Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk terwujudnya permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kota Bukittinggi menetapkan dua kelurahan yang berada pada satu kecamatan yang sama sebagai daerah sasaran pelaksanaan program Koatoku. Kelurahan ATTS dan Pakan Kurai yang berada di Kec. Guguak Panjang ditetapkan sebagai daerah sasaran pelaksanaan program berdasarkan SK Walikota No. 188.45-300-2014. Program Kotaku mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di Kota Bukittinggi dengan prinsip *Collaborative Governance*. Melalui prinsip ini, maka terwujud kerjasama yang kondusif antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Dalam pelaksanaannya, Program Kotaku di Kota Bukittinggi mampu mewujudkan *Human Governance* yaitu dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan, tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi juga hingga merawat dan menjaga setiap fasilitas yang ada.

#### **5.2 Saran**

Melihat pelaksanaan Program Kotaku di Kota Bukittinggi yang sudah berhasil dilaksanakan dengan baik maka diharapkan ke depannya program serupa tidak hanya menekankan pada perubahan fisik saja. Perubahan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan juga perlu mendapat perhatian khusus dari semua stakeholders terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, N. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Thoha, Miftah. 2018. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru

### Regulasi

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 40/ SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014

### Web

- Website resmi Kota Bukittinggi. <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/sebelas-prestasi-nasional-kado-istimewa-di-hjk-bukittinggi-ke-233> . diakses pada tanggal 25 Februari 2018

***CURRICULUM VITAE***  
**KETUA TIM PENELITI**

Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si  
 NIP/NIK : 19860514 201012 2 006  
 NIDN : 0014058601  
 Tempat /Tanggal Lahir : Koto Baru/ 14 Mei 1986  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Status Perkawinan : Menikah  
 Agama : Islam  
 Golongan/Pangkat : III C/ Penata  
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor  
 Alamat Rumah : Jl. Muaro No. 217 Jr. Simpang, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung, kab. Solok  
 Alamat Email : wewenkr@gmail.com

<b>RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI</b>			
<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Jurusan/Bidang Studi</b>
2010	S2	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik
2008	S1	Universitas Diponegoro	Administrasi Publik

<b>PELATIHAN PROFESIONAL</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Pelatihan</b>	<b>Penyelenggara</b>
2012	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Gol III	LPMP Provinsi Sumatera Barat
2011	Pelatihan Metodologi Penulisan Proposal Pengabdian Masyarakat Program Mono Tahun	LPMP Universitas Andalas
2011	Pelatihan Metode Pembelajaran SCL	Jurusan Antropologi, FISIP, Univ. Andalas

2010	Pelatihan Penguasaan Kompetensi Pedagogik dengan Bobot Materi setara 400 menit	Fakultas Teknologi Pertanian, Univ. Andalas
------	--	---

<b>PENGALAMAN JABATAN</b>		
<b>Jabatan</b>	<b>Institusi</b>	<b>Tahun...sd...</b>
Anggota Gugus Kendali Mutu	Jurusan Administrasi Publik, Fisip, Univ. Andalas	2018
Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2013 - 2014
Tim Seleksi Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Peningkatan Akademik	FISIP, Univ. Andalas	2013
Pengelola Jurnal On Line FISIP	FISIP, Univ. Andalas	2012
Divisi Publikasi dan Penerbitan Labor Administrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Univ. Andalas	2011
Sekretaris Tim Akreditasi Jurusan Adminitrasi Negara	Jurusan Administrasi Negara	2011

<b>PENGALAMAN PENELITIAN</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Sumber Dana / Nominal</b>
2019	Analisis Model <i>Human Governance</i> dalam Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi	Ketua	Dipa Fisip
2018	Penerapan <i>Good Mining Practice</i> Pada Pertambangan Emas PT. INEXCO Jaya Makmur (IJM) Pasca Lahirnya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Anggota	BOPTN Unand
2018	Implementasi Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Kota Berwawasan	Ketua	DIPA Fisip

	Lingkungan		
2017	Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ketua	DIPA Fisip
2016	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Padang	Ketua	DIPA Universitas
2016	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari di Kabupaten Solok Selatan	Anggota	DIPA Universitas
2015	Analisis Kualitas Pelayanan Perizinan dan investasi di kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal (KP3M) Kabupaten Solok	Ketua	DIPA FISIP
2014	Analisis kebijakan investasi dalam mendorong pertumbuhan investasi di kabupaten solok	Anggota	DIPA FISIP
2013	Analisis Etika Publik dalam Kompetensi Pejabat Publik	Ketua	DIPA FISIP
2012	Abilitas Inspektorat dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ditinjau dari Disain Organisasi	Anggota	DIPA

### KARYA TULIS ILMIAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2017	<i>Collaborative of Stakeholders in Formation and Development Nagari-Owned Enterprise</i>	Jurnal <i>Policy &amp; Governance Review</i> ; 2580-339w, Vo. 1, Issue 3 ISSN: 2580-3395 eSSN: 2580-4820 link: <a href="http://journal.iapa.or.id/pgr">http://journal.iapa.or.id/pgr</a>

2017	Analisis Penerapan Dimensi Etika Publik dalam Merumuskan Kebijakan Berbasis Gender pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2017 ISBN: 978-602-507000-0-6
2016	Analisis Implementasi Kebijakan Standar Mutu Pendidikan Internasional pada SMK di Kota Padang	Prosiding Semnas Ilmu Administrasi II FIS UNP 2016 ISBN: 978-602-72961-1-4
2016	Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)	Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) Edisi Vol 2 N0 1 2016, hal 93-108 e-ISSN 2527-6476
2012	Nilai Budaya dalam <i>Human Governance</i>	<i>E- Proceeding Innovative Governance at ASPA Indonesia International Seminar and IAPA Annual Conference 2012.</i> e-ISBN: 978-602-203-444-5

<b>PESERTA KONFRENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>
2017	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS 2017”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2016	Pemakalah pada “Seminar Nasional Ilmu Administrasi Negara FIS UNP 2016”	Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP
2013	Pemakalah pada “Konferensi IAPA 2013 dan Kongres Pertama IAPA”	IAPA dan Univ. Indonesia
2012	Pemakalah pada “Seminar Internasional ASPA Indonesia dan Konferensi Tahunan IAPA 2012 dengan Tema Pemerintahan Inovatif”	IAPA dan Univ. Brawijaya
2011	Pemakalah pada “Simposium Hasil Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional”	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011	Pemakalah pada “Konferensi Administrasi Negara/ Publik IV dan Seminar Nasional dengan tema Penguatan Administrasi Negara/ Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”	IAPA dan Univ. Hasanuddin
2011	Peserta pada “Seminar Sosialisasi Hasil Survei Nasional	KPPOD

	KPPOD 2011 Tata Kelola Ekonomi Daerah dan Pembangunan Iklim Usaha di Indonesia”	
--	---	--

<b>KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN MASYARAKAT</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Judul Pengabdian</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Sumber Dana / Nominal</b>
2018	Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Nagari tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Nagari Koto Tuo Kecamatan Nagari Kabupaten Sijunjung	Anggota	BOPTN
2018	Pelatihan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Prima pada Aparatur Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	Ketua	DIPA Fisip
2017	Pelatihan teknik Analisis Dukungan Stakeholders dalam Pengambilan Keputusan Publik oleh Aparatur Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara Kota PADANG	Ketua	Dipa Fisip
2017	Pelatihan Pengembangan Aparatur di Kecamatan Pauh Kota Padang	Anggota	
2016	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara ke SMAN 1 Kota Jambi Provinsi Jambi	Anggota	Dipa Fisip
2015	Pelatihan Pelayanan Berkualitas bagi Aparatur Perangkat Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar	Anggota	Dipa Fisip
2014	Pelatihan Pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah di SMAN 9 Kota Padang	Anggota	DIPA FISIP/ Rp. 5.000.000,-
2013	Diseminasi Kelompok pada Siswa SMA untuk Mewujudkan Kelompok-kelompok Belajar yang Efektif	Anggota	
2013	Pengenalan Konsep dan Aplikasi Model Implementasi Program dalam Rangka Meminimalisir Kegagalan Implementasi Program Pemerintah pada Aparatur Pemerintah Nagari di Nagari mungo Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	Anggota	
2012	Sosialisasi Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dalam Pembuatan Program Kerja Kec. Kubung, Kab. Solok	Ketua	DIPA Fakultas
2012	Pengabdian dan Sosialisasi Jurusan Administrasi Negara di SMAN 1 Guguk Kab.	Anggota	

	50 kota		
2011	Pengabdian Jurusan Administrasi Negara di Kec. Kolok, Kota Sawah Lunto	Anggota	

**Padang, November 2019**  
**Yang Menyatakan**

**Wewen Kusumi Rahayu,S.AP,M.Si**  
**NIP. 198605142010122006**